

Article History: Received: 20 October 2024, Revision: 20 November 2024, Accepted: 10 December 2024, Available Online: 1 January 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3394>

Manajemen Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Wisata Islami di Pantai Kabupaten Aceh Timur

Ismail ^{1*}, Muliana ²

^{1*} Program Studi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

² Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam, Institusi Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.

Email: ismail@akubanknusantara.ac.id ^{1*}, mulianal817@gmail.com ²

Abstrak. *Wisata Syariah merupakan bentuk pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip Syariat Islam, tidak hanya menonjolkan daya tarik destinasi tetapi juga memastikan pengelolaan sesuai dengan kaidah Islam. Perkembangan wisata syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wisata Islami di pantai Kabupaten Aceh Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi model kebijakan pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebersihan pantai telah terjaga dengan baik, pengelolaan layanan masih perlu ditingkatkan, dan pengunjung belum sepenuhnya mematuhi aturan berbasis syariah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mulai menerapkan regulasi melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayah Hisbah, namun kebijakan yang komprehensif belum tersedia. Kendala yang dibadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pengawasan, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap wisata Islami. Upaya strategis yang dilakukan mencakup sosialisasi, evaluasi, dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan wisata Islami yang berkelanjutan.*

Kata kunci: Manajemen; Kebijakan Pemerintah; Wisata Islami; Aceh Timur; Kualitatif.

Abstract. *Sharia Tourism refers to a form of tourism that adheres to Islamic principles, emphasizing not only the attractiveness of destinations but also ensuring management complies with Islamic guidelines. The development of sharia-based tourism has become an essential need for both national and global communities, significantly contributing to economic development. This study aims to analyze government policy management in developing Islamic tourism at the beaches of East Aceh Regency. A descriptive analytical method with a qualitative approach was employed to identify a model for local government policies. The findings reveal that while the cleanliness of the beaches is well-maintained, service management requires improvement, and visitors have not fully complied with sharia-based regulations. The East Aceh Regency Government has begun implementing regulations through the Islamic Law Office and Wilayah Hisbah; however, a comprehensive policy framework is not yet established. Challenges include limited budgets, insufficient supervisory personnel, and low public awareness of Islamic tourism. Strategic efforts include socialization, evaluation, and strengthening collaboration among stakeholders to support the sustainable development of Islamic tourism.*

Keywords: Management; Government Policy; Islamic Tourism; East Aceh; Qualitative.

Pendahuluan

Pantai merupakan salah satu sumber daya pariwisata penting di wilayah pesisir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, pantai juga dapat menjadi sarana pemberdayaan sumber daya alam dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup, serta memiliki potensi pendapatan yang tinggi dari permintaan wisata pantai. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di Provinsi Aceh, di mana permintaan wisata pantai terus mengalami peningkatan (Yang *et al.*, 2021; Zamarreño-Aramendia *et al.*, 2021; Cristiano & Gonella, 2020; Jamil, 2022). Dalam Penelitian ini, pengembangan pariwisata berbasis syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia dan menarik perhatian internasional, memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi (Adinugraha *et al.*, 2021; Khalida *et al.*, 2021). Persaingan di industri pariwisata juga menjadi faktor utama yang mendorong setiap destinasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya tariknya (Batubara, 2020; Yulista, 2021).

Kabupaten Aceh Timur, dengan pantainya yang menawarkan panorama alam indah, pasir putih, dan air laut jernih, menjadi salah satu destinasi unggulan. Tingginya kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan wisata Islami yang dapat memberikan pengalaman sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Konsep wisata Islami mengacu pada penerapan kaidah Islam dalam semua aspek pengelolaan destinasi. Hal ini mencakup pelarangan minuman beralkohol, penyediaan fasilitas ibadah, makanan dan minuman halal, pengaturan batas muhrim, serta penghindaran aktivitas yang berpotensi melanggar nilai-nilai syariah. Wisata Islami tidak hanya menekankan aspek rekreasi, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan wisata yang Islami dengan menyediakan fasilitas seperti musala, pusat makanan halal, serta kerajinan tangan dengan nuansa Islami. Dengan pengelolaan berbasis syariah, wisata pantai di Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pendorong ekonomi regional yang strategis. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata Islami di Kabupaten Aceh Timur. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wisata berbasis syariah.

Tinjauan Literatur

Konsep Manajemen Kebijakan Pemerintah
Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan atau organisasi. Kebijakan ini mencakup tujuan, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Velia, 2018). Objek dan daya tarik wisata (ODTWK) merujuk pada segala hal yang menjadi tujuan wisata, dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana yang relevan (Hanief & Pramana, 2018). Sebagai contoh, Qanun Nomor 1 Tahun 2014 menetapkan kebijakan penataan ruang kota yang mencakup berbagai aspek, antara lain: (1) Peningkatan pembangunan prasarana yang terintegrasi di Lhokseumawe untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan, (2) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, (3) Penguatan basis industri pengolahan, dan (4) Pengembangan pariwisata berbasis syariah, serta (5) Upaya menjaga kelestarian lingkungan (Efendi & Nuswantoro, 2019).

Konsep Mewujudkan Wisata Islami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata merujuk pada kegiatan perjalanan untuk rekreasi atau pelancongan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Siyāḥah, al-Rīḥlah, dan al-Safar, yang berarti perjalanan (Maulana, 2016). Undang-Undang Kepariwisataan No. 10/2009 mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah (Pariwisata, 2009). Wisata

dapat dipahami sebagai perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan dan hiburan (Paramansyah, 2017). Meskipun istilah "wisata" tidak secara eksplisit ditemukan dalam al-Qur'an atau hadis, terdapat berbagai ayat yang menyarankan perjalanan untuk melihat dan merenung atas ciptaan Allah, sebagai bentuk pembelajaran dan refleksi. Misalnya, dalam QS. Al-An'am: 11, Allah memerintahkan umat manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi sebagai sarana untuk memperoleh hikmah dan petunjuk (Quthb, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Perbawasari *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa model komunikasi pariwisata halal di Jawa Barat masih bersifat *top-down (procedural top-up)*. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata ditentukan oleh perencanaan yang matang dan tahapan yang jelas. Pentingnya perhatian lintas sektoral juga ditekankan untuk mendukung pengembangan wisata halal. Yousaf & Xiucheng (2018) menyarankan agar potensi suatu negara sebagai tujuan wisata halal diperkenalkan melalui promosi makanan halal, budaya makanan halal, restoran halal, dan layanan umum yang menarik bagi wisatawan Muslim. Selain itu, Nurhidayati & Rashid (2019) menunjukkan bahwa Pantai Syariah dapat menjadi alternatif objek wisata Islami di Indonesia, dengan informasi berharga untuk perencanaan paket wisata Islami. Wahyuni & Rahmawati (2021) juga menekankan pentingnya infrastruktur di pantai untuk menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, pantai wisata syariah merupakan komoditas strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah menjadi tantangan dalam pengembangan wisata halal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan, mengingat objek wisata pantai di Kabupaten Aceh Timur belum diteliti secara mendalam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menentukan cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pendekatan

kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berfokus pada penggambaran realita yang terjadi di lapangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Objek penelitian adalah pengelolaan wisata pantai di Kabupaten Aceh Timur, yang perlu disesuaikan dengan aturan-aturan syariah Islam. Adapun subjek penelitian terdiri dari pengelola pemerintah, yang mencakup Kantor Bupati Kabupaten Aceh Timur, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Syariat Islam, Camat Muara Satu, pengelola objek wisata, serta pengunjung objek wisata. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk memilih subjek yang dapat memberikan informasi yang relevan dan bersedia berbagi data yang diperlukan. Teknik ini sangat berguna untuk menggambarkan fenomena tertentu atau mengembangkan gagasan yang lebih mendalam tentang topik yang masih sedikit diketahui. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung non-partisipan untuk memperoleh informasi dari lokasi sampel penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi masyarakat dan mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan dengan kebijakan pemerintah mengenai wisata Islami di Pantai Kabupaten Aceh Timur.

Wawancara dilakukan secara lisan dan tertulis, melibatkan pihak pemerintah, pengelola objek wisata, serta para pengunjung objek wisata, untuk menggali informasi mengenai upaya pemerintah dan pengelola dalam mewujudkan kawasan wisata Islami. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dengan menelaah buku, referensi ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan jurnal-jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, yang mencakup pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah penelitian; penyajian data, yang melibatkan penyusunan informasi untuk penarikan kesimpulan; dan kesimpulan, yang bersifat sementara pada tahap awal dan semakin rinci serta mendalam seiring dengan bertambahnya data, hingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Manajemen Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Wisata Islami di Pantai Kabupaten Aceh Timur

Kondisi Riil Pantai Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur memiliki sejumlah lokasi wisata alam, termasuk pantai-pantai yang terletak sekitar 10 kilometer ke arah selatan dari pusat kota. Sebelumnya, pantai-pantai ini belum dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang baik, penerangan, serta penunjuk arah atau media promosi. Fasilitas layanan kesehatan juga masih terbatas. Masyarakat setempat, dengan inisiatif mereka, mulai mengembangkan kawasan wisata ini dengan menyediakan kios makanan dan minuman, area parkir, serta membersihkan lokasi pantai. Namun, pengelolaan kawasan wisata tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan lahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembenahan mulai dilakukan untuk mengelola kawasan ini sesuai dengan prinsip Islami. Berdasarkan pengamatan, kebersihan pantai telah ditingkatkan secara signifikan. Fasilitas seperti kamar mandi yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, musala dengan perlengkapan ibadah, serta area parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat telah disediakan. Pengelola juga memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual di lokasi memenuhi standar kehalalan. Selain itu, beberapa fasilitas tambahan seperti tempat duduk di tepi pantai dan bale di atas air turut menambah kenyamanan pengunjung. Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, pelanggaran terhadap syariat Islam, terutama di kalangan remaja dan pemuda, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pembenahan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan kawasan wisata pantai ini dapat sepenuhnya memenuhi standar Islami.

Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Wisata Islami

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur wisata Islami, sejumlah kriteria berbasis syariat telah diperkenalkan, seperti

aturan berpakaian sopan dan Islami, larangan membawa alkohol, narkoba, perjudian, serta larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah (WH) secara rutin melakukan penertiban untuk memastikan agar aturan-aturan tersebut dapat dipatuhi. Untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata yang sesuai dengan prinsip Islami, pemerintah telah menyediakan panduan bagi pengelola agar mereka menjalankan kegiatan secara legal, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, baliho dan spanduk imbauan telah dipasang untuk memberikan panduan kepada pengunjung mengenai aturan yang berlaku di kawasan wisata.

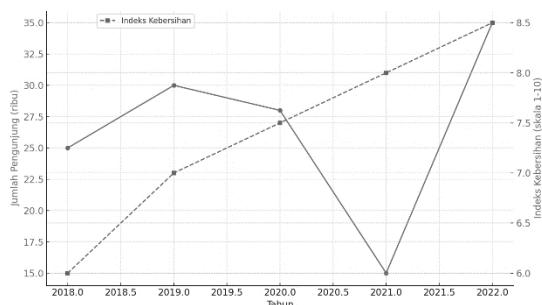
Upaya Pemerintah dalam Mendukung Wisata Islami

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus bekerja sama dengan masyarakat, aparat desa, dan tokoh pemuda untuk mewujudkan kawasan wisata Islami. Upaya sosialisasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wisata berbasis syariat. Pemerintah juga mendukung inovasi masyarakat melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, pemerintah menetapkan pengawasan di pintu masuk utama pantai untuk memastikan wisatawan mematuhi aturan yang berlaku. Kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi prioritas dalam pengembangan wisata, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman.

Arahan Kebijakan Pengembangan Wisata Islami

Pengembangan wisata Islami di Kabupaten Aceh Timur diarahkan pada beberapa poin utama. Pertama, syariat Islam dijadikan dasar dalam pengelolaan kawasan wisata, tanpa membatasi wisatawan non-Muslim, selama mereka mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, masyarakat lokal perlu dipersiapkan untuk menerima pariwisata sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dengan memberikan edukasi dan sosialisasi yang tepat. Ketiga, pemerintah memberlakukan pengawasan di pintu masuk untuk memastikan wisatawan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Keempat,

pengembangan kawasan wisata harus berorientasi pada keberlanjutan, dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wisata Islami tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dan layanan, tetapi juga berfungsi sebagai dakwah untuk mengedukasi umat Islam agar tetap menjaga nilai-nilai agama bahkan saat berwisata. Fasilitas seperti tempat makan halal dan musala, serta layanan wisata yang mematuhi aturan berpakaian Islami, menjadi elemen penting dalam pengembangan kawasan ini. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wisata, kawasan pantai di Aceh Timur berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mampu memadukan keindahan alam dengan nilai-nilai Islami.



Gambar 1. Tren Jumlah Pengunjung dan Indeks Kebersihan Pantai Kabupaten Aceh Timur (2018–2022)

Grafik 1 menggambarkan tren jumlah pengunjung dan indeks kebersihan di pantai Kabupaten Aceh Timur selama periode 2018 hingga 2022. Jumlah pengunjung pantai Kabupaten Aceh Timur menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 25 ribu pengunjung, yang meningkat menjadi 30 ribu pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi 15 ribu pengunjung, kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, jumlah pengunjung kembali pulih, mencapai 35 ribu pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan bahwa pantai Aceh Timur tetap menjadi destinasi wisata yang diminati, meskipun ada tantangan pada masa pandemi. Indeks kebersihan pantai terus meningkat selama periode yang sama. Pada tahun 2018, indeks kebersihan berada di angka 6 dari skala 1-10. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan indeks

mencapai angka 8,5 pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan upaya pengelola dan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai, termasuk melalui peningkatan fasilitas dan pengelolaan limbah. Diketahui bahwa meskipun ada kendala, seperti pandemi COVID-19, pantai di Kabupaten Aceh Timur tetap menarik perhatian wisatawan, khususnya setelah kebijakan dan pembenahan fasilitas dilakukan. Selain itu, tren peningkatan kebersihan menunjukkan hasil positif dari upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan wisata Islami yang tidak hanya memenuhi aspek estetika, tetapi juga sesuai dengan prinsip kebersihan dalam Islam.

Pembahasan

Pengembangan wisata Islami di Pantai Kabupaten Aceh Timur menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan potensi pariwisata berbasis syariat Islam. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, implementasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan destinasi pariwisata menciptakan peluang untuk menarik wisatawan domestik dan internasional yang mengutamakan pengalaman sesuai dengan ajaran agama. Model ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Adinugraha *et al.* (2021), yang menyebutkan bahwa pariwisata halal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pantai di Kabupaten Aceh Timur memiliki keunggulan berupa keindahan alam yang khas, seperti pasir putih dan air laut yang jernih, serta keasrian lingkungan yang terjaga. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, penerangan, dan fasilitas umum lainnya pada awalnya kurang memadai (Jamil, 2022). Berkat inisiatif masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, pembenahan dilakukan secara bertahap, termasuk penyediaan fasilitas ibadah, makanan halal, area parkir yang tertata, dan kebersihan pantai yang kini lebih terjaga (Nurhidayati & Rashid, 2019). Pemerintah daerah menerapkan sejumlah langkah untuk memastikan penerapan syariat Islam di sektor pariwisata. Regulasi seperti larangan perjudian, narkoba, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama menjadi bagian dari pengelolaan kawasan wisata (Efendi & Nuswantoro, 2019). Upaya penegakan dilakukan melalui patroli Wilayah Hisbah, yang juga berperan dalam memberikan

edukasi kepada pengunjung. Selain itu, spanduk dan baliho yang memuat aturan wisata Islami ditempatkan di lokasi strategis untuk memberikan panduan kepada wisatawan.

Keberhasilan pengelolaan wisata Islami di Aceh Timur juga bergantung pada promosi yang efektif. Promosi yang mengangkat keunikan budaya lokal dan nilai-nilai Islami dapat meningkatkan daya tarik destinasi. Seperti yang diungkapkan oleh Yousaf dan Xiucheng (2018), strategi pemasaran halal yang baik mampu memperkuat daya saing destinasi pariwisata di pasar global. Hal ini relevan mengingat Aceh Timur memiliki keunggulan unik sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Selain promosi, pengembangan wisata Islami juga membutuhkan perhatian terhadap keberlanjutan. Aspek kebersihan dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas penting dalam pengelolaan destinasi, sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Langkah seperti pengelolaan limbah, penyediaan fasilitas ramah lingkungan, dan pemeliharaan ekosistem lokal mendukung terciptanya pariwisata yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga ramah terhadap alam (Zamarreño-Aramendia *et al.*, 2021).

Partisipasi masyarakat setempat memegang peran penting dalam menciptakan suasana wisata yang Islami. Keterlibatan mereka, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun dalam mematuhi aturan syariat, memperkuat integrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Wahyuni dan Rahmawati (2021) menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap manfaat wisata Islami sebagai upaya mendukung keberlanjutan ekonomi daerah. Pengembangan wisata Islami di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa pengelolaan yang berbasis syariat mampu meningkatkan nilai tambah destinasi wisata. Regulasi yang jelas, promosi strategis, dan sinergi antar pihak terkait menjadi fondasi untuk menciptakan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui langkah-langkah yang terencana, Aceh Timur dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan wisata halal di Indonesia.

Kesimpulan

Pantai di Kabupaten Aceh Timur telah menunjukkan peningkatan dalam aspek kebersihan lingkungan, namun pengelolaan pelayanan masih memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi standar wisata Islami. Beberapa pengunjung juga belum sepenuhnya mematuhi aturan berbasis syariat Islam. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wisata Islami belum terintegrasi sepenuhnya dalam kerangka regulasi formal, meskipun sejumlah aturan telah diterapkan melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayah Hisbah (WH). Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pelaksanaan nilai-nilai Islam melalui berbagai langkah seperti penempatan petugas WH dan penguatan pengawasan secara berkelanjutan. Beberapa kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran untuk pengembangan destinasi, minimnya personel untuk pengawasan, serta kapasitas pengelola yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melakukan langkah strategis berupa sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola tempat wisata, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan aturan yang ada. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wisata diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pantai sebagai destinasi wisata Islami yang tidak hanya menarik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., Nasution, I. F. A., Faisal, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., ... & Purwanto, A. (2021). Halal tourism in Indonesia: An Indonesian council of ulama national sharia board fatwa perspective. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 665-673.
- Batubara, W. H. (2020). *Pengaruh daya tarik wisata, lokasi dan harga terhadap keputusan berkunjung wisatawan danau Singkarak: Studi pada pengunjung objek wisata halal danau Singkarak Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Cristiano, S., & Gonella, F. (2020). 'Kill Venice': a systems thinking conceptualisation of urban life, economy, and resilience in tourist cities. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1-13.
- Efendi, M., & Nuswantoro, P. (2019). Pengelolaan Pariwisata Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan. *Rensam Jurnal Hukum*, 5(2).
- Hanief, S., Pramana, D., Kom, S., & Kom, M. (2018). *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Jamil, M. (2022). Pengembangan Community-Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Objek Wisata Pantai Leuge Aceh Timur). *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 7-13. DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.478>.
- Khalida, N. D., Nasrulloh, N., & Ardyansyah, F. (2021, December). Sharia Tourism Prospects and Post-Pandemic Regional Economic Welfare: A Study on The Sumenep Community. In *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (Vol. 5, pp. 359-368).
- Maulana, A. (2016). Pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, 11(1), 119-144. DOI: <https://doi.org/10.47608/jki.v11i12016.119-144>.
- Nurhidayati, S. E., & Rashid, B. (2019). Sharia beach as an alternative attraction for Islamic tourism in Indonesia. *Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN*, 8, 44-79.
- Paramansyah, A. (2017). Teknik Promosi Pengembangan Potensi Pariwisata. *Jurnal Ilmiah "DUNIA ILMU"* VOL, 3(1).
- Pariwisata, K., & Kreatif, E. (2009). Undang Undang Kepariwisataan No 10 Tahun 2009. *Ladki, SM, Mikdash, TS, Fahed, W., & Abbas, H.*(2002). *Arab tourists and the*.
- Perbawasari, S., Sjuchro, D. W., Setianti, Y., Nugraha, A. R., & Muda, I. (2019). *Halal tourism communication formation model in west Java, Indonesia*. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 25 (2), 309–320.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Quran Edisi Istimewa Jld 19*. Gema Insani.
- Velia, N. W. (2018). *Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekarangan Pada Komplek Perumahan Mansion At Pertanian di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wahyuni, S., & Rahmawati, R. (2021). Analysis of the Potential Sharia Tourism in West Nusa Tenggara. *Point of View Research Economic Development*, 2(2), 59-67.
- Yang, W., Cai, F., Liu, J., Zhu, J., Qi, H., & Liu, Z. (2021). Beach economy of a coastal tourist city in China: A case study of Xiamen. *Ocean & Coastal Management*, 211, 105798. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105798>.
- Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2018). Halal culinary and tourism marketing strategies on government websites: A preliminary analysis. *Tourism Management*, 68, 423-443.
- Zamarreño-Aramendia, G., Cruz-Ruiz, E., & Ruiz-Romero de la Cruz, E. (2021). Sustainable economy and development of the rural territory: Proposal of wine tourism itineraries in La Axarquía of Málaga (Spain). *Economies*, 9(1), 29.